



Asistensi Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri

Mendra Wijaya^{1*}, Parjiyana², Chevy Ning Suyudi³, Faisol⁴

^{1,2} Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

³ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri, Kota Kediri, Indonesia

⁴ Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kota Kediri, Indonesia

*Corresponding author: mendrawijaya@soc.uir.ac.id

Received 25-10-2025

Revised 17-11-2025

Published 12-12-2025

ABSTRAK

Pembangunan daerah merupakan proses kompleks yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan asistensi kepada Pemerintah Kota Kediri dalam menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD 2025–2029 sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berbasis data, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan teknokratik digunakan melalui pengumpulan data primer dan sekunder terkait geografi, demografi, dan kondisi sosial-ekonomi Kota Kediri. Proses ini dilengkapi dengan workshop dan diskusi panel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memvalidasi temuan dan merumuskan visi pembangunan. Evaluasi dilakukan melalui analisis isu strategis serta penyusunan indikator SMART untuk memperkuat implementasi kebijakan. Kegiatan ini meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan memperkaya kajian dalam ilmu perencanaan wilayah. Melalui pengabdian ini, Pemerintah Kota Kediri diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap tantangan lokal dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Perencanaan Pembangunan Daerah; Pembangunan Berkelanjutan; Teknokratik; Kolaborasi.

ABSTRACT

Regional development is a complex process that encompasses various social, economic, and public policy aspects. This community service activity aims to provide assistance to the Kediri City Government in preparing the Technocratic Draft of the 2025–2029 RPJMD as a foundation for data-driven, inclusive, and sustainable development planning. A technocratic approach was applied through the collection of primary and secondary data related to the city's geography, demographics, and socio-economic conditions. The process was strengthened through workshops and panel discussions involving multiple stakeholders to validate findings and formulate a relevant development vision. Evaluation was carried out by analyzing strategic issues and developing SMART indicators to support effective policy implementation. This activity enhanced the quality of regional planning and contributed to academic discourse in development planning. Through this program, the Kediri City Government is expected to produce policies that are responsive to local challenges and aligned with sustainable development goals.

Keywords: Regional Development Planning; Sustainable Development; Technocratic; Collaboration.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah di Indonesia merupakan proses multidimensi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan publik, yang semuanya



saling terkait untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Rakhman & Wijayana, 2024). Salah satu instrumen utama perencanaan pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menetapkan sasaran pembangunan strategis untuk lima tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, pengurangan disparitas antardaerah, dan penguatan daya saing ekonomi nasional (Martina et al., 2023, Goodrich et al., 2020) .

Kota Kediri, sebagai kota yang berkembang pesat di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Dengan mendukung penyusunan rancangan teknokratis RPJMN 2025-2029, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat membantu Pemerintah Kota Kediri dalam merancang rencana pembangunan yang selaras dengan visi dan misi daerah. Penyusunan rencana pembangunan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dengan menggunakan pendekatan berbasis data untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan lokal dan potensi sumber daya yang ada.

Pesatnya pertumbuhan kota, khususnya di kawasan urban seperti Kediri, menunjukkan bahwa kesuksesan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan jangka pendek (Sembiring, 2022). Perencanaan yang efektif harus mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan dalam satu rencana panjang yang sinergis (Zanariah & Wijaya, 2024). Terletak di pusat wilayah dengan akses yang sangat strategis ke kota-kota besar, Kota Kediri menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Masalah-masalah tersebut memerlukan perencanaan yang lebih cermat dan jauh ke depan agar dapat menanggapi kebutuhan saat ini dan juga visi untuk masa depan (Harsanto & Wahyuningrat, 2024, Zainal et al., 2025) .

Kebijakan pembangunan daerah harus mempertimbangkan tidak hanya aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang responsif terhadap perubahan iklim (Pedersen et al., 2019). Kota Kediri menghadapi tantangan dalam meningkatkan infrastruktur dasar, termasuk transportasi, sanitasi, dan penyediaan air bersih, yang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, melalui dukungan penyusunan rancangan teknokratis RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) (Widyawati Islami Rahayu et al., 2025), diharapkan dapat tercipta kebijakan pembangunan yang mengoptimalkan potensi Kota Kediri dan menjawab berbagai tantangan yang ada, sekaligus memastikan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, layanan ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat (Hilmawan et al., 2023).

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah Kota Kediri dapat memperoleh bantuan dalam menyusun RPJMD yang tidak hanya mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lokal yang lebih spesifik. Dengan adanya asistensi teknokratik, kualitas perencanaan diharapkan akan

lebih baik, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Kediri di masa depan. Pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Kediri menjadi suatu tantangan yang semakin mendesak, terutama dalam menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi dan keterbatasan infrastruktur. Dengan pertumbuhan yang pesat, kota ini menghadapi masalah seperti ketidakmerataan pembangunan antarwilayah, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan dampak perubahan iklim yang memperburuk kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD berbasis data yang menggunakan pendekatan teknokratik menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang perencanaan RPJMD berbasis data dan teknokratik, serta untuk menutup kesenjangan yang ada dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan manfaat dari kegiatan ini tidak hanya dapat dirasakan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perencanaan daerah di Indonesia, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan berbasis bukti.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan teknokratik yang berfokus pada penggunaan data dan analisis objektif untuk merumuskan kebijakan dan rekomendasi pembangunan daerah. Pendekatan teknokratik ini sangat relevan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD karena mengutamakan analisis berbasis bukti yang didukung oleh data faktual, statistik, serta pemodelan perencanaan yang terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan yang lebih terukur dan realistis, yang tidak hanya mempertimbangkan kondisi ideal tetapi juga mencerminkan realitas yang ada di lapangan.

Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan berbagai stakeholders yang memiliki peran teknis dalam pembangunan, seperti akademisi, praktisi, dan pejabat pemerintah daerah. Dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam tentang kondisi daerah, diharapkan dapat terwujud rekomendasi yang tidak hanya teoritis, tetapi juga dapat langsung diterapkan dalam kebijakan pemerintah.

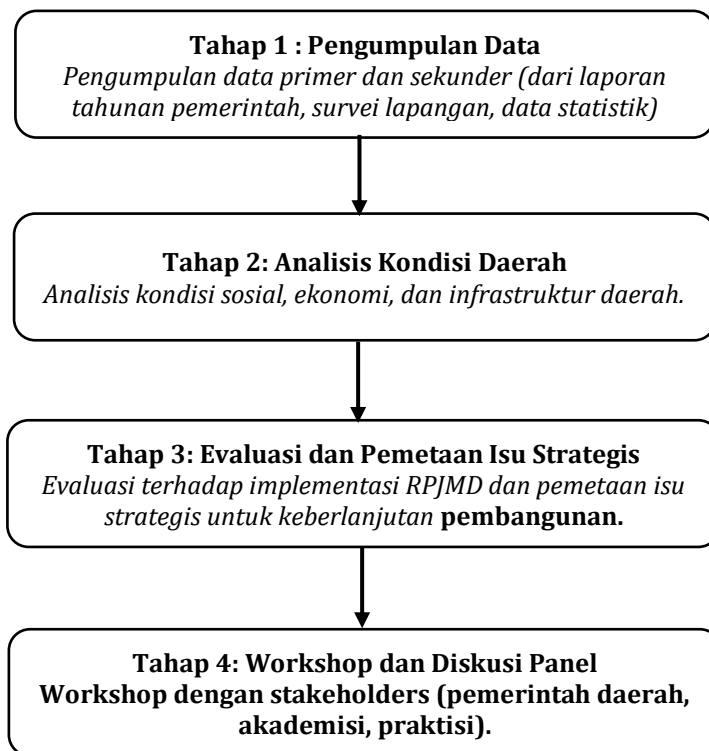
Metode yang Diterapkan

Pengumpulan Data dan Analisis Kondisi Daerah

Pengumpulan data primer dan sekunder mengenai kondisi geografi, demografi, ekonomi, dan sosial budaya di Kota Kediri. Data ini akan mencakup informasi dari laporan tahunan pemerintah, survei lapangan, dan data statistik resmi. Analisis data akan dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan daerah berdasarkan aspek-aspek utama, seperti kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum.

Workshop dan Diskusi Panel

Mengadakan workshop dan diskusi panel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi. Workshop ini bertujuan untuk memvalidasi temuan-temuan awal serta untuk mengembangkan visi dan misi yang relevan dalam RPJMD. Diskusi panel akan mengkaji isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi Kota Kediri, seperti isu perubahan iklim, ketimpangan sosial ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat digambarkan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur, seperti yang terlihat pada flowchart berikut ini :



Metode ini mengutamakan keterlibatan berbagai *stakeholders* agar hasil RPJMD lebih relevan dengan kebutuhan daerah dan dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan teknokratis ini diharapkan menghasilkan RPJMD yang lebih mudah diimplementasikan dan responsif terhadap perubahan serta tantangan. Lebih lanjut, kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu perencanaan pembangunan daerah dan praktik tata kelola dengan menghasilkan dokumen berbasis bukti dan kontekstual lokal sebagai referensi kebijakan. Pengabdian kepada masyarakat ini juga memperkaya literatur tentang perencanaan berbasis data di Indonesia. Pengabdian ini menjadi contoh konkret tentang bagaimana teori dan praktik dapat dipadukan untuk memecahkan masalah pembangunan daerah, yang tidak hanya bermanfaat bagi Kota Kediri tetapi juga menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

HASIL KEGIATAN

Pengumpulan Data dan Kegiatan Pemetaan Isu-Isu Strategis Dalam Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Kediri

Pemetaan isu-isu strategis ini berfungsi sebagai dasar perumusan kerangka logis RPJMD Kota Kediri. Pendekatan teknokratik membantu pemerintah daerah mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara permasalahan daerah, tujuan pembangunan, dan strategi yang diperlukan. Dengan demikian, kegiatan asistensi tidak hanya menghasilkan daftar isu, tetapi juga mengarahkan prioritas pembangunan yang dapat diukur dan diawasi secara periodik. Sinkronisasi antara isu daerah dan isu nasional menghasilkan peta keterpaduan yang kuat, misalnya, isu transformasi tata kelola daerah di Kediri berkontribusi langsung pada agenda nasional “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel.” Demikian pula, agenda pengembangan ekonomi berbasis digital dan hijau mendukung tema transformasi ekonomi nasional.

Dari hasil asistensi, diperoleh peningkatan kapasitas mitra (Bappeda dan OPD) dalam mengelompokkan isu strategis sesuai logical framework RPJMD. Penguatan pemahaman konsep SMART indicators dan integrasi lintas dokumen (RPJPD, RPJMN, SDGs, dan SAKIP) menjadi capaian penting kegiatan ini. Dengan adanya hasil pemetaan ini, Kota Kediri memiliki dasar analitis yang kuat untuk menyusun rancangan teknokratik RPJMD yang terukur, terarah, dan sejalan dengan kerangka pembangunan nasional.

Tabel 1. Pemetaan Isu-Isu Strategis

Bidang Isu Strategis	Permasalahan Utama	Akar Masalah	Arah Strategi RPJMD Kota Kediri	Keterkaitan dengan RPJMN 2025–2029
1. Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan	Rendahnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja antar-OPD	Fragmentasi data dan lemahnya kapasitas SDM perencanaan	Penguatan tata kelola berbasis kinerja, digitalisasi sistem perencanaan penganggaran (SIPD)	Transformasi tata kelola: integritas birokrasi, sistem penggajian tunggal, manajemen talenta ASN
2. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Keterbatasan jaringan transportasi dan infrastruktur dasar antar-wilayah kota	Ketimpangan akses dan kondisi infrastruktur lama	Pembangunan jalan arteri utama, jema-tan, sistem drainase terpadu, dan transportasi publik ramah lingkungan	Transformasi ekonomi: pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan penguatan konektivitas wilayah
3. Ekonomi Daerah dan Digitalisasi	Pertumbuhan ekonomi belum inklusif dan bergantung pada sektor konvensional	Rendahnya inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor	Pengembangan ekonomi berbasis teknologi, penguatan UMKM, promosi investasi, dan pembentukan klaster industri kreatif	Transformasi ekonomi: ekonomi digital, inovasi dan industri-lisasi berkelanjutan

4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Ketimpangan akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan	Keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas, dan pemerataan pelayanan publik	Penguatan pendidikan vokasi, peningkatan IPM, pemerataan fasilitas kesehatan dasar, dan digitalisasi layanan pendidikan	Transformasi sosial: penguatan SDM unggul, kesehatan merata, dan pendidikan berkualitas
5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Perkotaan	Tekanan urbanisasi terhadap daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas sanitasi	Minimnya integrasi tata ruang dan kesadaran ekologi	Implementasi <i>green city</i> , pengelolaan air dan drainase berkelanjutan, sistem persampahan modern, dan penataan ruang berbasis mitigasi bencana	Agenda pembangunan berkelanjutan: kota hijau, resilien, dan rendah emisi
6. Inovasi dan Teknologi Pemerintahan	Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Sistem informasi antar-OPD belum terintegrasi	Penerapan <i>smart governance</i> , digitalisasi layanan publik, dan pemanfaatan <i>big data</i> untuk perencanaan	Transformasi digital pelayanan publik dan integrasi proses bisnis

Analisis Kondisi Daerah

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa arah pembangunan Kota Kediri sangat selaras dengan agenda utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu Transformasi Ekonomi dan Tata Kelola untuk Indonesia Maju. Kota Kediri berupaya menyelaraskan diri dengan kerangka transformasi nasional tersebut melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas ekonomi daerah, dan penerapan inovasi teknologi di berbagai sektor. Isu-isu strategis yang muncul tidak terbatas pada permasalahan sektoral, melainkan lintas sektor terutama yang terkait dengan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ketahanan perkotaan (Ivandriyan Sabilla & Rizal Sutikno, 2024). Pendekatan lintas sektor ini merupakan langkah krusial untuk memastikan pembangunan daerah yang terpadu dan sinergi antar-lembaga daerah dan antar-daerah.

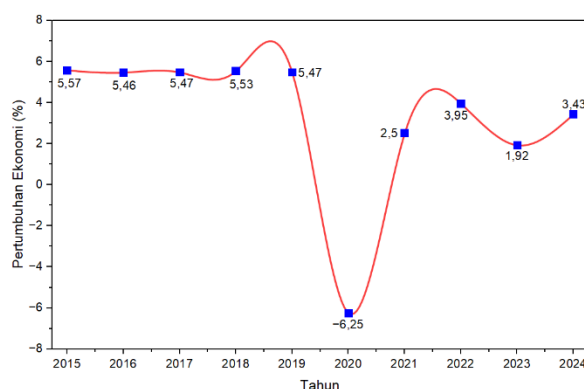
Program pendampingan penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD berperan krusial dalam membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan instansi daerah menerjemahkan isu-isu strategis tersebut menjadi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang operasional dan terukur. Melalui kegiatan-kegiatan seperti diskusi kelompok terarah (FGD), klinik pendampingan, dan tinjauan pustaka, proses pembangunan diselaraskan dengan berbagai kerangka kebijakan—termasuk RPJPD, RPJMN, SDGs, dan SAKIP. Pendampingan ini tidak hanya menghasilkan konsistensi teknis di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga meningkatkan kemampuan analisis para pejabat dalam merumuskan indikator SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu). Dengan demikian,

perencanaan pembangunan di Kediri semakin berbasis hasil dan berbasis bukti objektif.

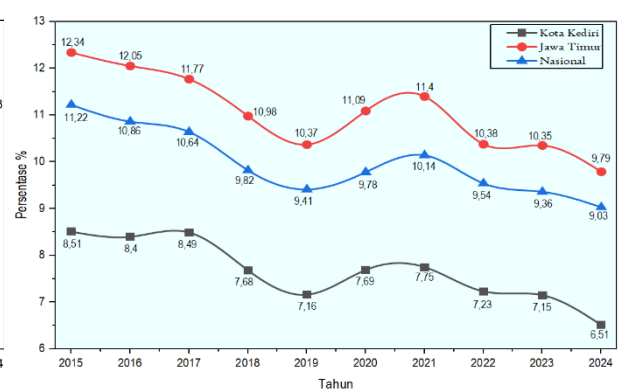
Secara keseluruhan, hasil pendampingan ini menghasilkan peta isu strategis terpadu yang menjadi landasan penyusunan kerangka logis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kediri. Peta tersebut menggambarkan kondisi aktual, tantangan pembangunan, dan arah transformasi menuju kota yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing. Pendekatan teknokratis yang diterapkan mendorong perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan landasan tersebut, RPJMD bukan sekadar dokumen formal, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan tata kelola pembangunan daerah yang efektif, inovatif, berorientasi pada hasil, dan berkelanjutan. Hasil pemetaan isu-isu strategis memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan pembangunan di Kota Kediri, khususnya dalam aspek ekonomi. Misalnya, isu ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat diatasi melalui penguatan infrastruktur transportasi dan digitalisasi sektor UMKM. Dengan demikian, pemetaan ini akan mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi dan memperkuat daya saing daerah, sejalan dengan tujuan pembangunan jangka menengah.

Evaluasi dan Pemetaan Isu Strategis Lainnya

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Kota Kediri memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor perdagangan dan pariwisata. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah ketidakmerataan ekonomi antar wilayah serta kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Tahun 2015-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2024
(diolah)

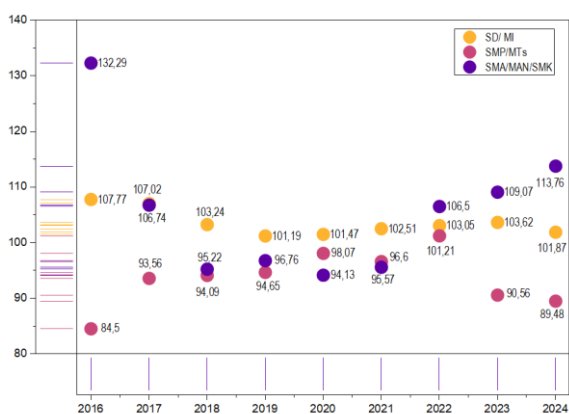


Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin di Kota Kediri, Jawa Timur, dan Nasional 2015-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2024
(diolah)

Gambar 1 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kediri selama periode 2015-2024. Secara umum, grafik ini mencerminkan fluktuasi yang sangat besar, terutama penurunan tajam yang terjadi pada tahun 2016 (dengan nilai -6,25%) dan peningkatan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, meskipun tidak kembali ke

angka yang positif secara konsisten hingga 2024. Fluktuasi tajam ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi global dan domestik yang berdampak pada kota tersebut, seperti bencana alam, pandemi, atau kebijakan ekonomi yang tidak stabil. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi setelah 2020 bisa menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi atau sektor-sektor ekonomi tertentu yang mulai kembali berkembang, misalnya di sektor perdagangan dan pariwisata. Sedangkan Gambar 2 menunjukkan persentase penduduk miskin di Kota Kediri, Jawa Timur, dan secara nasional selama periode yang sama (2015-2024). Terlihat bahwa meskipun ada penurunan tingkat kemiskinan di Kota Kediri, angka kemiskinan masih cukup signifikan, terutama jika dibandingkan dengan angka nasional atau Jawa Timur. Kendala utama yang tercermin dalam grafik ini adalah ketidakmerataan pembangunan yang terlihat dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa sektor tertentu (seperti sektor perdagangan dan pariwisata), namun tidak mampu menjangkau atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Identifikasi permasalahan lainnya di Kota Kediri menjadi aspek penting dalam penyusunan RPJMD. Berdasarkan analisis mendalam, tim penyusun menemukan beberapa isu utama, antara lain ketimpangan dalam distribusi pembangunan, terbatasnya akses terhadap layanan publik, serta dampak negatif dari urbanisasi yang cepat terhadap lingkungan. Isu-isu ini memerlukan perhatian serius dalam merancang kebijakan pembangunan jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi isu strategis yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan (Andrista et al., 2025), agar daerah dapat tetap tangguh menghadapi dampak perubahan iklim global (Massagony et al., 2025).



Gambar 3. Angka Partisipasi Murni APM Kota Kediri Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2024
(diolah)



Gambar 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Kediri Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2024
(diolah)

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan gambaran yang lebih spesifik terkait partisipasi penduduk usia sekolah ideal pada jenjang pendidikan yang sesuai. APM SD/MI berada pada tingkat yang sangat tinggi dan stabil, yaitu di

kisaran 97 hingga 100 persen, yang menandakan keberhasilan Kota Kediri dalam menjamin pemerataan pendidikan dasar. Untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MAN/SMK, APM menunjukkan fluktuasi namun cenderung meningkat pada tahun-tahun terakhir, masing-masing mencapai 87,1 persen dan 85,68 persen pada tahun 2024. Meskipun capaian tersebut belum mencapai 100 persen, tren peningkatan yang terjadi mencerminkan adanya kemajuan positif dalam pemerataan akses pendidikan menengah. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pemerataan dan partisipasi pendidikan di Kota Kediri telah menunjukkan arah yang semakin baik dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian wajib belajar 12 tahun (Santang & Isharyanto, 2020).

Sementara, perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Kediri selama periode 2016–2024 menunjukkan capaian yang relatif tinggi di seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI, APK tercatat stabil di kisaran 101 hingga 108 persen, mencerminkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah bersekolah, bahkan melibatkan sebagian peserta didik di luar usia ideal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kota Kediri telah merata dan terjaga dengan baik. Sementara itu, APK SMP/MTs menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun setelah tahun 2020, yang menandakan perlunya perhatian lebih terhadap peningkatan partisipasi remaja usia sekolah menengah pertama. Adapun APK SMA/MAN/SMK memperlihatkan pola yang dinamis dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024 setelah mengalami penurunan pada periode sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan akses dan minat terhadap pendidikan menengah atas sebagai hasil dari berbagai upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di Kota Kediri.

Workshop dan Dikusi Panel Antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah Kota Kediri

Perguruan tinggi memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk di Kota Kediri. Selain menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, perguruan tinggi juga berkontribusi pada penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan. Di Kota Kediri, memiliki berbagai perguruan tinggi yang dapat berperan penting dalam menyediakan analisis berbasis data terkait kebutuhan pembangunan daerah. Melalui penelitian yang mereka lakukan, perguruan tinggi dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang akurat mengenai berbagai isu pembangunan, seperti ekonomi, infrastruktur, dan sosial budaya, yang relevan dengan kondisi setempat.



Gambar 5. Aktivitas Workshop dan Diskusi Panel Penyusunan Rantek RPJMD Kota Kediri

Lebih lanjut, perguruan tinggi juga berperan dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang berbasis pada hasil penelitian, yang berfokus pada peningkatan daya saing Kota Kediri. Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi berdampak langsung pada masyarakat, termasuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), penyediaan pendidikan keterampilan vokasional, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan, perguruan tinggi berkontribusi dalam menawarkan solusi yang lebih inovatif dan efektif serta mengurangi ketimpangan sosial di wilayah tersebut (Nurfarida et al., 2018).

Perguruan tinggi juga memainkan peran strategis sebagai mitra dalam perencanaan jangka panjang Kota Kediri. Dalam merancang rencana pembangunan, peran aktif perguruan tinggi sangat penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan merekomendasikan kebijakan yang valid dan berbasis data. Perguruan tinggi juga memberikan pelatihan bagi pejabat pemerintah daerah, yang akan membantu meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah. Kolaborasi ini akan krusial dalam memastikan kebijakan yang lebih terarah (Pettarani et al., 2024) dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di Kota Kediri. Setelah pelaksanaan pengabdian ini, evaluasi akan dilakukan dengan cara memantau pelaksanaan RPJMD yang telah disusun dan mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Evaluasi

ini akan melibatkan kolaborasi antara Bappeda, Perangkat Daerah, dan akademisi untuk menilai kesesuaian hasil perencanaan dengan kebutuhan lapangan. Keberlanjutan pengabdian ini juga akan dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan bagi pejabat perencana daerah serta pengembangan sistem manajemen data yang lebih baik di pemerintah daerah

Dengan kontribusi yang signifikan ini, perguruan tinggi di Kota Kediri tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan, yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Ke depannya, sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi diharapkan semakin intensif, memperkuat kapasitas daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang lebih efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Kota Kediri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan dalam penyusunan rancangan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 Kota Kediri telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terstruktur dan berbasis data. Perguruan tinggi, sebagai mitra strategis, memainkan peran kunci dengan menyediakan penelitian yang relevan dan rekomendasi berbasis bukti bagi pembangunan daerah. Dengan menggunakan pendekatan teknokratis, perencanaan pembangunan menjadi lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kebutuhan daerah. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan daerah dan mendukung tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, perencanaan pembangunan di Kota Kediri diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menegaskan bahwa penerapan pendekatan teknokratis dalam penyusunan RPJMD dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan memastikan keselarasan dengan agenda pembangunan nasional. Ke depannya, langkah-langkah lanjutan yang perlu diambil meliputi pelatihan berkelanjutan, pengembangan manajemen data di seluruh instansi pemerintah daerah (OPD), dan penyempurnaan mekanisme evaluasi berbasis bukti agar perencanaan daerah lebih adaptif, inklusif, dan berfokus pada hasil.

Pemerintah Kota Kediri disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan universitas dan pemangku kepentingan lainnya guna menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif dan berbasis data. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan perlu ditingkatkan untuk mendukung efisiensi dan akurasi kebijakan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen kebijakan berkelanjutan juga krusial. Fokus pada pemetaan isu-isu

strategis lokal, seperti ketimpangan sosial-ekonomi dan manajemen infrastruktur berkelanjutan, akan membantu mengatasi tantangan masa depan secara lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Kediri, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri, atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik selama pelaksanaan kegiatan asistensi penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para Kepala Perangkat Daerah, pejabat fungsional perencana, serta seluruh peserta lokakarya dan coaching clinic yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrista, S., Utami, N. P., Hukom, V., Nielsen, M., & Nielsen, R. (2025). Responses to climate change: Perceptions and adaptation among small-scale farmers in Indonesia. *Journal of Environmental Management*, 377(January), 124593. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.124593>
- Goodrich, K. A., Sjostrom, K. D., Vaughan, C., Nichols, L., Bednarek, A., & Lemos, M. C. (2020). Who are boundary spanners and how can we support them in making knowledge more actionable in sustainability fields? *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 42(June 2019), 45–51. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.01.001>
- Harsanto, B. T., & Wahyuningrat, W. (2024). Investigating the keys to the failure of inter-village government collaboration in developing rural economic potentials in Indonesia. *Regional Science Policy and Practice*, 16(5), 100023. <https://doi.org/10.1016/j.rssp.2024.100023>
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Yudaruddin, R., Anggraini Bintoro, R. F., Suharsono, Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Public sector innovation in local government and its impact on development outcomes: Empirical evidence in Indonesia. *Heliyon*, 9(12), e22833. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22833>
- Ivandriyan Sabilla, M., & Rizal Sutikno, F. (2024). Pengembangan Infrastruktur Hijau Dalam Pembangunan Green City Di Kota Kediri. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 13(4), 195–206. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/753>
- Martina, D., Witjaksono, M. A., & Putranto, R. (2023). Advance Care Planning in Indonesia: Current state and future prospects. *Zeitschrift Fur Evidenz, Fortbildung Und Qualitat Im Gesundheitswesen*, 180, 94–98. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2023.05.016>
- Massagony, A., Pandit, R., & White, B. (2025). Political economy of energy policy in Indonesia towards net zero emissions by 2060. *Energy for Sustainable Development*, 88(May). <https://doi.org/10.1016/j.esd.2025.101757>
- Nurfarida, E., Sukya, F., Agung Nugroho, B., Rizky Aullia, F., & Informasi Politeknik Negeri Malang PSDKU Kediri, M. (2018). *JIP (Jurnal Informatika Polinema)*

VISUALISASI POTENSI SEKTOR PEREKONOMIAN KOTA KEDIRI MENGGUNAKAN METODE SHIFTSHARE. 591–596. http://deenha.id/analisis_potensi/.

- Pedersen, T., Soda, G., & Stea, D. (2019). Globally networked: Intraorganizational boundary spanning in the global organization. *Journal of World Business*, 54(3), 169–180. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.03.001>
- Pettarani, A., Wijaya, M., Widyastuti, T. V., & Said, A. L. (2024). *Pengantar Kebijakan Publik : Teori dan Praktek* (Cetakan I). PT Media Penerbit Indonesia.
- Rakhman, F., & Wijayana, S. (2024). Human development and the quality of financial reporting among the local governments in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 56(June), 100634. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2024.100634>
- Santang, K., & Isharyanto, I. (2020). Implementasi Kota Layak Anak Di Kota Kediri. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 3(2), 125–135. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45619>
- Sembiring, R. A. (2022). Analisis Aktor Pembangunan dalam Smart Environment Kota Kediri Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 88–108. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.44272>
- Widyawati Islami Rahayu, N., Sawir, M., Melawati, F., & Mu'is, A. (2025). The public space Paradox: Balancing governance and street vending in urban Indonesia. *Social Sciences and Humanities Open*, 11(May), 101559. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101559>
- Zainal, Mukhlis, M., Utomo, S., Ardiansyah, & Wijaya, M. (2025). Towards an Environmentally Friendly Palm Oil Industry: A Critical Review of Waste Reduction Policies by Indonesian Government. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(7), 2955–2962. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200719>
- Zanariah, & Wijaya, M. (2024). *Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Kediri* (Cetakan I.). PT Media Penerbit Indonesia.